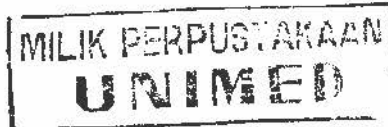


BAB I

PENDAHULUAN



1.1. Latar Belakang

Masyarakat nelayan selama kurang lebih 32 tahun kekuasaan Orde Baru hampir sama sekali tidak mendapatkan sentuhan kebijakan-kebijakan pembangunan ekonomi. Betulkah kebijakan pembangunan yang diformulasikan selama ini, selalu mengedepankan jiwa, semangat, yang tidak berpihak kepada nelayan? Realitasnya, nelayan kita umumnya masih terpinggirkan dan diabaikan sendirian menghadapi berbagai persoalan kompleks.

Sejak dulu hingga sekarang, pemberdayaan nelayan belum tergarap secara proporsional. Kondisi nelayan cenderung ditengarai oleh berbagai citra kurang menguntungkan. Yakni, kualitas sumber daya manusia yang rendah, modal pas-pasan, alat tangkap sederhana (tradisional), posisi lawar yang lemah, serta hidup di lingkungan pesisir dalam strata sosial kelas bawah (berkesan kumuh dan bau amis).

Berbagai persoalan pun senantiasa mendera jutaan nelayan di negeri ini. Mulai dari sistem pelelangan ikan yang menambah penderitaan nelayan sampai kepada kapal-kapal yang beroperasi dengan teknologi canggih di perairan Indonesia. Kapal nelayan asing yang masuk beroperasi mendesak eksistensi nelayan tradisional serta mengurangi ikan tangkapan dan penghasilan nelayan. Tak pelak, nasib nelayan kita pun kian terimpit.

Karena pengawasan terhadap kapal nelayan asing belum memadai, konon ikan yang tercuri ada sekitar 80.000 ton/musim. Sementara itu, nelayan kita hanya mampu menangkap 60.000 ton/musim¹. Gambaran itu mengindikasikan betapa lemah posisi nelayan dalam perpacuan kehidupan antar komunitas kelautan. Apalagi tingkat

¹ Agus Wariyanto, *Dilema Kemiskinan Nelayan*, Pikiran Rakyat, 20 September 2005

pendapatan nelayan yang rendah juga mengimbas ke derajat kesehatan, sedangkan mutu pendidikan mereka sangat rendah. Akhirnya, muncullah kantong-kantong kemiskinan serta merembuklah patologi sosial kemasyarakatan seperti kriminalitas, pengangguran, eksploitasi anak-anak jermal yang cukup memprihatinkan.

Pada hakikatnya nelayan adalah golongan masyarakat yang masih perlu diberdayakan dan harkat hidup mereka perlu diangkat. Lebih-lebih pada krisis ekonomi yang terus berlangsung dewasa ini nelayan tradisional kian terkucil dari lahan mereka.

Indonesia dikenal sebagai negara maritim sejak berabad-abad silam. Namun kesadaran sebagai bangsa maritim masih jauh dari harapan. Pencurian harta karun di lautan masih kerap terjadi. Pencurian ikan di perairan tetap berlangsung. Pada masa depan kemampuan pengawasan oleh aparat negara kita perlu ditingkatkan agar kekayaan dan potensi sumber daya laut tak dikeruk secara semena-mena oleh nelayan mancanegara yang makin merajalela.

Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki perairan terpanjang. Dari total perairan 5,8 juta km², lebih dari separo atau 3,1 juta km² merupakan perairan Nusantara (laut wilayah dan teritorial). Adapun sisanya, sekitar 2,7 juta km², adalah wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI).²

Masalah perairan Nusantara memang tak dapat diabaikan. Sebab, itu yang paling menyentuh kehidupan nelayan tradisional, yakni, nelayan gurem. Kebijakan deregulasi yang dilaksanakan pemerintah untuk mendayagunakan potensi ZEEI sungguh tepat. Namun perlu dibarengi terobosan strategis untuk memberikan peluang kemudahan mendapat suntikan modal bagi nelayan tradisional.

² Safaruddin Husada, *Nelayan Makin Miskin*, Media Indonesia, 20 Oktober 2005.

Agaknya modernisasi dalam pengelolaan sumber daya laut belum seirama dengan peningkatan nasib nelayan. Sebagian besar warga masyarakat nelayan di Indonesia masih hidup dalam situasi sosial dan ekonomi di bawah standar. Umumnya nelayan hidup dalam taraf subsisten dan situasi sosial mereka termasuk tertinggal. Ada pula yang menilai fenomena sosial tentang kemiskinan nelayan disebabkan oleh pola hubungan kerja antara majikan (tauke) dan nelayan. Memang pola hubungan antara patron dan klien ini, tidak selalu eksploitatif, sebab nilai kerja sama masih terpelihara. Namun hasrat nelayan untuk keluar dari sistem yang telah mapan tidak mudah terwujudkan. Sebab, proses hubungan kerja kebapakan (tauke) membentuk mentalitas nelayan secara ekonomis tergantung pada majikan. Akibatnya, perasaan berutang budi di kalangan nelayan terhadap majikan (tauke) telah menjadi lingkaran setan yang tak mudah diselesaikan.

Persoalannya adalah pengambil kebijakan di negeri ini belum memahami secara komprehensif apa sebenarnya akar permasalahan kemiskinan nelayan. Kemiskinan nelayan hanya dipahami sebatas angka-angka statistik yang dikeluarkan BPS yang sifatnya umum.

Menurut A Latif Winata (2003) penelitian tentang masyarakat nelayan penting karena pertama, secara kuantitatif, kajian tentang masyarakat nelayan atau masyarakat pesisir masih sangat terbatas (langka) jika dibandingkan dengan masyarakat petani atau masyarakat perkotaan. Kajian terhadap masyarakat nelayan ini memiliki nilai yang sangat berarti untuk kepentingan pembangunan manusia karena masyarakat nelayan merupakan masyarakat yang paling miskin dibandingkan dengan kelompok masyarakat lainnya.

Kedua, kelangkaan kajian di atas sangat ironis jika dikaitkan dengan sifat negara kita sebagai negara maritim yang terbesar di dunia. Dari segi akademis ini, kita kalah

jauh dengan kuantitas dan kualitas kajian serupa di Filipina dan Thailand. Kelangkaan ini juga mencerminkan lemahnya perhatian dan kebijakan kita di bidang kemaritiman (ocean policy). Oleh karena itu, menjadi wajar jika akhirnya pembangunan terhadap sektor kemaritiman nasional masih terbelakang jika dibandingkan dengan kedua negara anggota ASEAN di atas. Kelangkaan kita di bidang kemaritiman justru dimanfaatkan oleh para nelayan dari kedua negara tersebut untuk melakukan praktik penangkapan ikan secara ilegal di perairan Indonesia.

Ketiga, mengkaji masyarakat nelayan bukan persoalan yang mudah sehingga bisa menarik perhatian para peneliti. Daerah pantai yang panas, permukiman nelayan yang padat dan sesak, dan kondisi masyarakatnya yang dianggap “keras” dan kurang higienis, merupakan hambatan bagi seseorang untuk meminati kajian masyarakat pesisir.

Sebagaimana disebut A Latief, sangat ironis bagi kita bahwa sebuah negara maritim yang mahaluas dan kaya akan sumber daya ini ternyata masyarakat pesisirnya miskin dan terbelakang karena perhatian pembangunan di bidang maritim itu sangat kurang. Selama masa Orde Baru kita telah memalingkan diri dari laut (maritim) dan memeluk erat-erat daratan (pertanian dan industrialisasi) yang ternyata juga tidak menjadikan bangsa dan negara ini jaya sebagai negara agraris dan negara agro-industri. Karena itu pula masyarakat nelayan di Indonesia pada umumnya dan di Percut Kabupaten Deli Serdang seakan dibalut oleh budaya kemiskinan sejak berabad-abad yang lalu.

Mengingat pentingnya penelitian tentang budaya kemiskinan masyarakat nelayan untuk mencari tahu latar belakang, terutama penyebab timbulnya kemiskinan di kalangan masyarakat Percut Kabupaten Deli Serdang. Saya ingin mengetahui latar belakang dan faktor-faktor penyebab kemiskinan tersebut dari perspektif antropologi, sehingga saya

lebih menitik beratkan pendekatan sosial budaya untuk meneliti masyarakat nelayan miskin di Percut. Budaya kemiskinan seperti malas, apatis, kurang berjiwa wiraswasta, biasanya sebagai penyebab kemiskinan itu menjadi budaya di Percut.

1.2. Rumusan Masalah

Permasalahan dalam penelitian ini adalah faktor-faktor sosial budaya apa yang menyebabkan keberlanjutan kemiskinan di kalangan masyarakat nelayan desa Percut, sehingga merupakan sebuah budaya kemiskinan.

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan

1. Mengungkapkan kondisi sosial ekonomi masyarakat miskin nelayan desa Percut.
2. Mengungkapkan kondisi demografis dan ekologis masyarakat desa nelayan Percut.
3. Menelusuri faktor-faktor sosial budaya yang menyebabkan kemiskinan.
4. Menelaah nilai-nilai budaya yang memungkinkan ketahanan mereka dalam kemiskinan.
5. Menemukan struktur budaya kemiskinan masyarakat nelayan di desa Percut kabupaten Deli Serdang.
6. Mencari jalan keluar (alternatif) untuk membeberkan mengenai budaya kemiskinan nelayan.

1.4. Tinjauan Pustaka

Studi tentang nelayan dan kemiskinan pernah dilakukan oleh ahli ekonomi Mubyarto, ahli antropologi Michel Dove serta sosiolog Lukman Sutrisno yang kemudian dituangkan dalam buku Nelayan dan Kemiskinan (1984). Dalam buku yang memusatkan

perhatian terhadap masyarakat nelayan di pantai utara Jawa itu diungkapkan bahwa kemiskinan nelayan bukanlah semata-mata persoalan ekonomi melainkan berkaitan dengan masalah-masalah sosial lain, kekuasaan, politik serta mentalitas nelayan. Penelitian dengan pendekatan multidisiplin itu mengungkapkan bahwa berbagai upaya perbaikan nasib nelayan yang dilakukan dengan berbagai program pemerintah tidak mendapatkan hasil berubahnya nasib nelayan, karenanya nelayan tetaplah miskin. Penyebabnya antara lain karena program pemerintah itu kurang memperhatikan faktor-faktor budaya dan struktur kekuasaan politik di desa nelayan.

Di kalangan nelayan di Sumatera Utara beberapa tulisan yang membahas tentang kemiskinan nelayan telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Ichwan Azhari (1996) misalnya melihat kemiskinan di kalangan nelayan pantai timur Sumatera Utara disebabkan oleh tiga varian utama yakni faktor alam, budaya dan struktur masyarakat. Penelitian yang mengaitkan hubungan antara nilai budaya dengan komunitas nelayan telah dilakukan oleh R.Hamdani Harahap (1994) yang mengulas keterkaitan faktor kebudayaan dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat nelayan dan pelestarian lingkungan di daerah pantai timur Sumatera Utara. Sementara itu Agustrisno (1993) meneliti tentang sosialisasi nilai budaya dalam lingkungan keluarga nelayan di kecamatan Tanjung Tiram, Asahan. Sebelumnya Agustrisno (1992) meneliti tentang budaya nelayan dengan fokus peran pawang laut dalam kehidupan sosial budaya masyarakat nelayan di kecamatan Barus, Kabupaten Tapanuli Tengah.

Di samping penelitian tentang sosial budaya masyarakat nelayan, beberapa peneliti juga ada yang melihat distribusi pendapatan nelayan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya seperti yang dilakukan oleh Prihatin Lumbanraja (1997) Sementara H.Helmy F.Rangkuti (1995) meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan

nelayan. Studi yang khusus membahas tentang kemiskinan nelayan dilakukan oleh Bengkel Grinting (1996) yang melihat respon rumah tangga nelayan terhadap program pembangunan bidang ekonomi dan kesejahteraan rakyat dengan mengambil kasus di desa Percut. Penelitian di Percut juga telah dilakukan oleh T.Marzuki Jacob dkk (1994) yang meneliti hubungan peranan isteri dengan kemiskinan nelayan. Sementara itu Jonathan Simuhadi dkk (1991) meneliti tentang kecupayaan memerangi kemiskinan pada nelayan tradisional di Sumatera Utara. Masalah kemiskinan dan ketimpangan pendapatan nelayan di Bagan Deli telah diteliti oleh Saskia (1996).

Semua hasil-hasil penelitian tentang nelayan di Sumatera Utara itu memberikan gambaran bagi penulis bahwa masalah nelayan dan perekonomiannya merupakan masalah yang sangat kompleks yang mempunyai kaitan yang erat dengan budaya kemiskinan sebagaimana fakta berikut ini.

Pertama, secara empiris Tinjabate (2001) membuktikan bahwa akibat kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, dalam pembangunan perikanan, yakni merealisasi kepentingan pemerintah untuk meningkatkan hasil produksi perikanan laut sebagai sumber devisa negara, — intervensi birokrasi dan kapitalisasi dalam kegiatan nelayan di Kecamatan Ampenan berlangsung secara intensif. Implikasinya adalah kepentingan-kepentingan nelayan tradisional terabaikan akibat perlakuan diskriminatif dari pemerintah daerah Kabupaten Poso.

Kedua, ketergantungan yang berbentuk hubungan patron-client antara pemilik faktor produksi (kapal, alat tangkap) dengan buruh nelayan. Penelitian Nasikun bersama rekan-rekannya tahun 1996 di daerah Muncar, Jawa Timur, Elfiandri tahun 2002 di pantai barat, Sumatera Barat dan Iwan tahun 2002 di daerah Kelurahan Nipah I dan II Kabupaten

Tajung Jabung, Jambi mengungkapkan kesimpulan substansinya sama bahwa akibat penetrasi kapitalisme dalam aktivitas nelayan di daerah ini menyebabkan kelompok nelayan dan buruh nelayan lebih cepat terseret dalam kemiskinan. Penggunaan teknologi penangkapan ikan yang diharapkan mengakibatkan terjadinya perubahan mode of production dari sistem tradisional menjadi modern ternyata jauh dari harapan. Hal ini dikarenakan proses yang terjadi tidak dibarengi oleh pergeseran hubungan kerja ke arah yang lebih rasional dan saling menguntungkan. Yang justru berkembang adalah pemilik modal (kapal dan teknologi penangkapan) melalui mekanisme ketergantungan yakni hubungan patron client dengan sistem bagi hasil menikmati pendapatan yang lebih besar dan menguasai akses pasar. Iwan menambahkan bahwa kelembagaan yang pernah ada seperti TPI, asosiasi nelayan, perkreditan ternyata tidak memenuhi harapan nelayan dan buruh nelayan sehingga mereka lebih tetap memilih kelembagaan lama yakni hubungan patronase. Akibatnya, kemiskinan nelayan menjadi permanen.

Ketiga, terjadinya over eksploitasi terhadap sumberdaya perikanan akibat modernisasi yang tak terkendali. Modernisasi perikanan ternyata membawa dampak yang signifikan terhadap penurunan hasil tangkapan nelayan tradisional. Prof. Mubyarto bersama rekan-rekannya tahun 1984 membuktikan hal ini melalui hasil penelitiannya di dua desa pantai di Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Mereka menyimpulkan bahwa akibat beroperasinya kapal-kapal penangkap ikan modern setiap nelayan mengalami penurunan hasil tangkapan sampai 58 %. Hal yang sama juga dibenarkan oleh Bailey dari ketika melakukan penelitian tahun 1988. Bahkan ia memberi kesimpulan yang "menyeramkan", yaitu nelayan tradisional adalah golongan yang paling miskin di antara golongan miskin di Indonesia.

Keempat, terjadinya konflik agraria yakni adanya "penyerobotan" wilayah perikanan tradisional yang dilakukan oleh perusahaan perikanan modern yang sejatinya

menjadi daerah beroperasinya nelayan tradisional. Kondisi ini sebenarnya juga sudah diungkapkan oleh Donald K. Emerson tatkala meneliti kehidupan nelayan tradisional di daerah Pati, Jepara, Rembang dan Demak pada tahun 1977, dimana dampak dari modernisasi perikanan itu telah menimbulkan konflik horizontal yang berujung pada pembakaran kapal-kapal penangkap ikan modern. Fenomena ini ternyata tidak mengalami perubahan sampai kini. Terbukti di daerah-daerah pesisir pantai Timur Sumatera seperti Tajung Balai, Deli Serdang dan Langkat, pantai barat Sumatera, perairan pantai utara Jawa, perairan Kalimantan Barat dan kepulauan Natuna kasus serupa sering terjadi.

Beberapa kasus—konflik agraria ini—juga dipicu oleh beroperasinya kapal asing baik secara legal maupun illegal yang menggunakan teknologi maju. Akibat nelayan tradisional semakin tertindas dan tidak berdaya.

Kelima, adanya fenomena “kompradorisme” meminjam pemikiran Neo-Marxis dalam kasus modernisasi perikanan tangkap. Fenomena ini berhasil diungkapkan oleh penelitian Tindjabate pada tahun 2001 yakni akibat intervensi kapitalisasi terhadap komunitas nelayan mengakibatkan terjadinya fragmentasi kegiatan nelayan yang semula homogen menjadi beragam. Keberagaman ini memunculkan formasi sosial baru yaitu adanya buruh nelayan dan ponggawa serta perubahan sumber penghasilan nelayan yang semula diusahakan sendiri menjadi upah yang diberikan juragan pemilik faktor produksi (pukat cincin). Kedudukan ponggawa di sini adalah sebagai “kelas komprador” yang bertindak sebagai “kaki tangan” juragan sekalipun dia juga berasal dari masyarakat nelayan yang sama sekali tidak memiliki akses ekonomi maupun politik. Ini baru terjadi di level “grass root”, yakni di komunitas nelayan.

Pada level yang lebih kebijakan makro ekonomi, kelas komprador berperan* sebagai “broker” lisensi dan perizinan yang bertindak yang bertopeng sebagai pengusaha domestik. Kelas komprador ini berkolusi dengan oknum birokrat/penguasa dan/atau elit di sekitar lingkaran kekuasaan untuk “memuluskan” keluarnya lisensi/izin penangkapan ikan bagi kapal ikan berbendera asing.

Apa yang dikemukakan beberapa peneliti di atas sejalan dengan uraian penulis-penulis lain seperti Muhammad Karim (2003), Anton Namba (2003), Akhmad Solichen (2004) Laode M.Kamaluddin (2003), Noer Sutrisno (2003) ataupun Masyhuri Imron (2003). Penulis-penulis yang disebut belakangan itu seakan meneguhkan pandangan bahwa nelayan identik dengan kemiskinan dan kemiskinan itu menjadi satu budaya dan benang kusut yang sukar diuraikan.

Faktor sosial budaya ini juga sejalan dengan apa yang disebut oleh Oscar Lewis (1966,1975) dengan budaya kemiskinan (culture poverty), yang menurut Lewis merupakan reaksi dan adaptasi kaum miskin terhadap kedudukan marginal mereka dalam masyarakat. Jika kebudayaan seperti itu muncul dalam suatu masyarakat maka menurut Lewis, ia cenderung mewariskannya ke generasi berikutnya.

1.5. Kerangka Teori

Kemiskinan dapat didekati dari tiga pendekatan, nilai budaya, lingkungan (faktor ekologis) serta struktur. Pendekatan yang terakhir itu (struktur) sering disebut dengan kemiskinan struktural. Kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang diderita oleh suatu golongan masyarakat karena struktur sosialnya, sehingga masyarakat itu tidak dapat ikut menggunakan sumber-sumber pendapatan yang sebenarnya tersedia bagi mereka (Alfian,Ed.1980). Kemiskinan struktural ini karena kelembagaan yang ada membuat anggota

atau kelompok masyarakat tidak menguasai sarana ekonomi dan fasilitas-fasilitas secara merata. Jadi kemiskinan ini tidak ada hubungannya dengan kelangkaan sumberdaya.

Sementara kemiskinan disebabkan oleh faktor budaya merupakan kemiskinan yang muncul karena tuntutan-tuntutan tradisi/adat membebani ekonomi masyarakat seperti upacara perkawinan dan kematian ataupun pesta-pesta adat lainnya. Disamping itu termasuk juga ke dalam kemiskinan ini sikap/mentalitas penduduk yang lamban, malas, konsumtif serta kurang berorientasi ke depan. Faktor sosial budaya kemiskinan juga adalah hambatan ataupun beban kultural yang dihadapi masyarakat dalam pertumbuhan ekonominya.

Lemahnya semangat kompetitif, kurangnya keinginan untuk kerja keras, kecenderungan untuk hidup santai dan cepat puas dengan hasil yang diperoleh, merupakan faktor sosial budaya kemiskinan.

Dari pengamatan permulaan saya ke desa Percut beberapa waktu yang lalu, kemiskinan masyarakat nelayan Percut disebabkan oleh faktor-faktor sosial budaya. Oleh karena itu penelitian ini ingin mengungkapkan latar sosial budaya yang menyebabkan terjadinya kemiskinan pada masyarakat nelayan di Percut, Kabupaten Deli Serdang.

Menurut Karim (2003) dari kaca mata ekonomi-politik, akar kemiskinan nelayan dapat dianalisis dari teori-teori besar pemikiran pembangunan yakni pemikiran liberal, radikal, maupun heterodoks. Kalangan liberal penganut teori modernisasi memandang bahwa penyebab kemiskinan adalah faktor internal, yakni budaya masyarakat tradisional yang menghambat modernisasi. Mereka lupa bahwa nilai-nilai modern yang mereka maksudkan adalah nilai-nilai yang berkembang di negara maju yang tidak serta-merta menjadi patokan bagi negara-negara berkembang, semisal Indonesia, maupun negara-negara Afrika. Makanya, di tahun 1990-an ini berkembang suatu pemikiran baru yang

mengangkat nilai-nilai lokal dalam aliran pemikiran pembangunan liberal yang acapkali disebut sebagai modal sosial (social capital). Kalau kita cermati, gagasan tentang modal sosial ini pada hakikatnya masih dalam mainstream liberal. Oleh karena, secara substansi tesis pengembangan modal sosial adalah hasil proses metamorfosis dari pemikiran liberal. Mungkin lebih tepat disebut neo-liberalisme. Tesisnya sederhana, yakni hampir tiga dasawarsa terakhir modal utama pembangunan di negara-negara berkembang berupa sumber daya alam (hutan, perikanan, perkebunan) mengalami degradasi yang signifikan.

Sementara kondisi kemiskinan di negara-negara berkembang tidak mengalami perbaikan yang signifikan. Pemikiran kalangan liberal bertolak belakang dengan kalangan radikal penganut teori ketergantungan, Marxis, dan Neo-Marxis dalam memahami fenomena kemiskinan. Kalangan ini menganggap bahwa kemiskinan terjadi bukan karena nilai-nilai budaya tradisional yang dianut oleh suatu masyarakat tetapi disebabkan oleh "tindakan eksploitatif" kaum pemilik modal dan faktor produksi terhadap sumber daya ekonomi yakni sumber daya alam (hutan, perikanan dan perkebunan) dan sumber daya manusia.

Menjelaskan fenomena kemiskinan nelayan akan lebih relevan menggunakan teori-teori radikal. Secara teoretis maupun empiris, problem kemiskinan nelayan adalah pertama kuatnya tekanan-tekanan struktural. Masalah lain yang sering menimbulkan perdebatan adalah berkembangnya stereotip negatif di kalangan nelayan, yaitu hidup boros, sulit diatur, tidak bisa dipercaya, dan lain sebagainya. Stereotip negatif ini memang tidak menguntungkan nelayan. Kalau selama ini pemerintah dalam meluncurkan program-program pemberdayaan dengan menempatkan nelayan sebagai obyek pemberdayaan dan bukan subyek pemberdayaan sebagaimana diinginkan Bagong Suyanto (2003), hal ini terjadi karena salah satu pertimbangannya adalah stereotip tersebut.

Dengan stereotip tersebut, menurut A.Latief (2003) seolah-olah nelayan harus diajari bagaimana menjadi orang yang tidak boros hidupnya, bisa dipercaya orang lain, tidak mengotori lingkungan, dan sebagainya. Jadi, stereotip menjadi legitimasi penempatan nelayan sebagai obyek pembangunan. Kita sering lupa bahwa gaya hidup yang disebut "boros" itu sesungguhnya tidak tepat. Konsumsi yang agak berlebihan tersebut dilakukan oleh keluarga nelayan hanya pada saat memperoleh penghasilan yang cukup besar. Mereka juga ingin menikmati hidup yang sewajarnya, tidak harus terpaksa hidup irit terus-menerus. Sekalipun demikian, mereka memiliki kemauan untuk menyisihkan sedikit dari penghasilan yang berlebih itu untuk ditabung atau dibelikan barang-barang berharga, yang kelak bisa didayagunakan kalau terjadi kesulitan ekonomi.

1.6. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini bersifat kualitatif sesuai dengan prinsip-prinsip metode kualitatif yang dikembangkan Moleong (2000). Metode penelitian menggunakan wawancara mendalam (*in-depth interview*) terhadap informan terpilih (*purposive informant*). Informan akan dipilih dari keluarga-keluarga nelayan miskin di desa Percut. Yang akan diwawancarai adalah nelayan sebagai kepala keluarga, ibu rumah tangga, para nelayan yang belum berkeluarga serta anak-anak.

Wawancara juga akan dilakukan terhadap keluarga nelayan yang tergolong tidak miskin untuk mengetahui pendapat mereka tentang keluarga nelayan miskin. Di samping itu peneliti akan mewawancarai berbagai institusi di desa nelayan seperti koperasi, pemerintah desa (kepala desa dan perangkatnya), puskesmas di samping para pedagang serta tauke (cukong). Data-data kuantitatif dan dokumen akan dikumpulkan untuk mendukung data-data kualitatif. Penelitian berlangsung selama 2 bulan, dimulai pada bulan Februari 2005 sampai bulan Maret 2005.

Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif. Mula-mula data dikelompokkan berdasar kategori yang ditetapkan, yakni pendapatan nelayan, pendapatan anggota keluarga yang lain, serta pendapatan-pendapatan yang secara tidak langsung bisa menghemat pengeluaran keluarga. Lalu data itu dianalisis dihubungkan dengan pengeluaran-pengeluaran untuk konsumsi, untuk membayar hutang, perbaikan rumah, biaya sekolah anak, biaya biaya sosial serta pengeluaran-pengeluaran yang bersifat konsumtif.

Data yang telah dianalisis kemudian disimpulkan dengan cara menghubungkan antara pendapatan dan pengeluaran. Setelah itu kesimpulan akan ditarik ke faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya ketimpangan antara pendapatan dan pengeluaran nelayan. Kesimpulan akan menjawab kenapa nelayan yang dari segi pendapatan tinggi tapi menjadi miskin serta menyimpulkan bagaimana cara mengatasi kondisi tersebut.

1.7. Kerangka Berpikir

Berangkat dari kerangka teori, yang menempatkan kemiskinan sebagai sesuatu yang disebabkan oleh tiga faktor yakni faktor nilai budaya, lingkungan (faktor ekologis) serta struktur (faktor politis), maka penelitian ini menempatkan faktor sosial budaya sebagai penyebab utama kemiskinan nelayan di Desa Percut Kabupaten Deli Serdang.

Jika kemiskinan tidak disebabkan oleh faktor lingkungan maka hasil tangkapan ikan di laut sebenarnya memadai, sehingga nelayan tidak masuk dalam kategori miskin. Nelayan yang dari segi pendapatan tidak miskin ini kemudian menjadi miskin disebabkan faktor nilai budaya yang menguras pendapatan nelayan untuk keperluan-keperluan yang menyebabkan terjadinya pemborosan, sehingga nelayan akhirnya terjebak dalam kemiskinan.

Faktor nilai budaya ini menyebabkan nelayan tidak rasional dalam menggunakan dan mendistribusikan pendapatannya untuk keperluan sehari-hari. Misalnya pendapatan lebih banyak didistribusikan untuk keperluan-keperluan yang sifatnya konsumtif yang sebenarnya tidak bisa dilakukan dengan tingkat pendapatannya itu. Juga pengeluaran untuk biaya-biaya sosial budaya, seperti melakukan acara untuk mengayunkan, menyunatkan ataupun mengawinkan anak, yang dilakukan serba mewah yang tidak sebanding dengan pendapatannya yang nyata. Untuk acara-acara seperti itu nelayan kerap sekali berhutang, sehingga pendapatan hariannya yang sebenarnya memadai, sebagian harus dipakai untuk membayar hutang sebagaimana yang dialami nelayan di Desa Percut Kabupaten Deli Serdang.

Faktor lingkungan masih memungkinkan nelayan memperoleh hasil tangkapan ikan yang memadai dan dari segi struktur harga yang diperoleh nelayan masih wajar karena dekat dengan kofa. Tapi dua faktor (lingkungan dan struktur) yang menguntungkan nelayan ini disebabkan karena faktor nilai budaya yang membuat mereka menjadi boros, akhirnya membuat nelayan tak bisa terhindar dari kemiskinan. Oleh karena itu penelitian ini melihat bahwa faktor nilai budaya sangat berperan dalam proses pemiskinan nelayan.